

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
RINGKASAN.....	x
SUMMARY.....	xliii
DAFTAR ISI.....	lxxiv
GLOSARIUM.....	lxxvii
DAFTAR SINGKATAN.....	lxxix
DAFTAR GAMBAR.....	lxxx
DAFTAR TABEL.....	lxxxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoretis.....	13
F. Kerangka Pemikiran Disertasi.....	115
G. Metode Penelitian.....	116
H. Originalitas Penelitian.....	120
I. Sistematika Penulisan.....	123

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Sistem Pemidanaan di Indonesia..... 125
- B. Kesenjangan Dan Kealpaan Dalam Pidana..... 143
- C. Perlindungan, Bantuan Hukum Dan Pertanggungjawaban Diskresi..... 192
- D. Prinsip Doktrin Menanggung Akibat..... 195
- E. Keadilan Restoratif..... 198

BAB III KEWENANGAN DISKRESI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN PADA SAAT INI

- A. Kewenangan Diskresi..... 204
- B. Tindakan Polisi dalam Sistem Peradilan..... 234
- C. Diskresi Yang Diterapkan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian.....240
- D. Kewenangan Diskresi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial.....260

BAB IV FAKTOR PELAKSANAAN KEWENANGAN DISKRESI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN

- A. Faktor-faktor Pelaksanaan Kewenangan Diskresi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian..... 267
- B. Substansi Pelaksanaan Kewenangan Diskresi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian.....269
- C. Struktur Pelaksanaan Diskresi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian..... 290
- D. Budaya Hukum Pelaksanaan Kewenangan Diskresi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian..... 294

BAB V REKONSTRUKSI KEWENANGAN DISKRESI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DI INDONESIA YANG BERBASIS KEADILAN DAN KEMANFAATAN

- A. Kewenangan Diskresi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian Di Beberapa Negara 298
- B. Rekonstruksi Nilai Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian Di Indonesia Berbasis Keadilan dan Kemanfaatan..304

C. Rekontruksi Norma Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian Di Indonesia Berbasis Keadilan dan Kemanfaatan	318
--	-----

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	326
B. Saran.....	328
C. Implikasi Kajian Desertasi.....	329

DAFTAR PUSTAKA

GLOSARIUM

- Adil : Dimana semua orang mendapat hak menurut kewajibannya. Sebagian besar orang mendefinisikan kata **ADIL** adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih dan masih banyak lagi persepsi yang lainnya.
- Asas : Prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya.
- Berbasis : Berdasar
- Hukum : Peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.
- Implementasi : Penerapan atau pelaksanaan.
- Keadilan : Suatu hal yang harus kita tetapkan dan tidak boleh dilanggar, berperilaku adil memang tidak mudah, namun kita tetap harus menjalankan hakikat **keadilan** yang sebenarnya.
- Masyarakat : Sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi

terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Nilai : Prinsip umum tingkah laku yang ada dalam pikiran anggota-anggota kelompok yang merupakan komitmen positif dan standar untuk mempertimbangkan tindakan dan tujuan tertentu

Paraturan/Aturan : Patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/Organisasi tertentu yang jika dilanggar akan dikenakan hukuman/sanksi. Dari pernyataan ini bisa kita temukan beberapa poin utama. Yaitu patokan, membatasi, organisasi, dan sanksi jika dilanggar.

Pidana : Tindakan/ Hukuman yang berupa derita

Rekonstruksi : Penyusunan kembali

DAFTAR SINGKATAN

ABRI : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

AUPB : Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik

HAM : Hak Asasi Manusia

KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

LPKS : Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat

NKRI : Negara Republik Indonesia

POLRI : Polisi Republik Indonesia

TNI : Tentara Nasional Indonesia

DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Pemikiran.....	115
--------------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel	3.1 Originalitas Penelitian.....	120
Tabel	3.2 Diskresi Di Wilayah Hukum Polda Jateng	221
Tabel	5.1 Diskresi Kepolisian di Negara Asing.....	298
Tabel	5.2 Rangkuman Rekonstruksi Kewenangan Diskresi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian Berbasis Keadilan Dan Kemanfaatan	325